



Article Informations
Corresponding Email:
syihabarsal1@gmail.com

Received: 05/02/2025; Accepted:
15/02/2025; Published: 30/06/2025

KEPENTINGAN NASIONAL TURKI MENANDATANGANI MoU DELIMITASI MARITIM DENGAN GOVERNMENT OF NATIONAL ACCORD (GNA) LIBYA PADA TAHUN 2019

Arsal Syihab Al Mudzakar

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Konflik Libya pasca-Arab Spring 2011 berlanjut dengan ketidakstabilan politik yang memicu ketegangan antar pihak. Pada 2019, Turki menandatangani MoU dengan GNA Libya terkait delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur sebagai strategi memperkuat klaim maritim dan pengaruh geopolitiknya. Meskipun tidak diakui secara internasional, MoU ini menjadi landasan Turki mengeksplorasi sumber daya energi di kawasan tersebut. Melalui kebijakan Blue Homeland dan Neo-Ottomanisme, Turki meningkatkan kehadiran militer dan pengaruh di jalur strategis. Artikel ini menganalisis kebijakan luar negeri Turki, kepentingan nasional di balik MoU, serta dampaknya terhadap stabilitas geopolitik Mediterania Timur.

Kata Kunci: Turki, Libya, Yunani, GNA, MoU, Laut Mediterania Tmur

Abstract

The post-Arab Spring Libyan conflict in 2011 continues with political instability that has triggered tensions between the parties. In 2019, Turkey signed an MoU with Libya's GNA on maritime delimitation in the Eastern Mediterranean as a strategy to strengthen its maritime claims and geopolitical influence. Although not recognized internationally, the MoU is the basis for Turkey to explore energy resources in the region. Through its Blue Homeland and Neo-Ottomanism policies, Turkey has increased its military presence and influence in strategic lanes. This article analyzes Turkey's foreign policy, the national interests behind the MoU, and its impact on the geopolitical stability of the Eastern Mediterranean.

Keyword: Turkey, Libya, Greece, GNA, MoU, Eastern Mediteranian Sea

PENDAHULUAN

Konflik Libya bermula dari Arab Spring 2011, dipicu penahanan aktivis HAM Fethi Tarbel, yang berkembang menjadi perang saudara hingga terbunuhnya Qaddafi. Transisi oleh National Transitional Council (NTC) gagal memenuhi harapan reformasi. Perpanjangan mandat sepihak General National Congress (GNC) pada 2014 memicu protes yang melibatkan Jenderal Khalifa Haftar, yang memimpin Libyan National Army (LNA) melawan militan Islam di Benghazi. Konflik berlanjut dengan dualisme kekuasaan antara GNC dan House of Representatives (HoR), diperparah oleh intervensi asing dan kemunculan ISIS.¹

PBB memediasi pembentukan GNA pada 2015 untuk menyatukan Libya, namun dualisme kekuasaan tetap terjadi antara GNA (didukung Turki-Qatar) dan LNA (didukung Mesir-UEA-Rusia). Intervensi Turki melalui pengiriman pasukan dan MoU delimitasi maritim 2019 dengan GNA bertujuan melindungi kepentingan geopolitik dan ekonominya di Mediterania Timur. Konflik Libya berevolusi menjadi perang proksi dengan keterlibatan kekuatan asing yang memperburuk situasi politik dan keamanan negara..²

Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai kepentingan nasional Turki menandatangani MoU delimitasi maritim dengan Government National Accord (GNA) Libya pada tahun 2019. Pada penulisan artikel ini juga berdasarkan pada tinjauan pustaka terdahulu sebagai acuan, yaitu Arini, Zayyina. "Intervensi Turki dan Mesir terhadap Perang Saudara di Libya." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 2, No. 2 (2021): 202-209.³ Dan Zikri, Andi Ahmad Khairullah. "Intervensi Militer Turki terhadap Wilayah Kedaulatan Suriah Tahun 2016-2019." Universitas Riau. Vol. 8, No. 1 (2021): 2-12.⁴ Pada penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang menjelaskan keadaan atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebuah metode penelitian kualitatif dalam meninjau mengenai kepentingan nasional Turki menandatangani MoU delimitasi maritim dengan Government National Accord (GNA) Libya pada tahun 2019 dengan menggunakan sumber-sumber dari jurnal, buku, berita, skripsi, serta sumber terpercaya sehingga membuat penelitian ini menjadi kredible.

PEMBAHASAN

KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI DI LAUT MEDITERANIA TIMUR

¹ Britannica. (nd). Pemberontakan Libya tahun 2011 .[https://www.Bahasa Inggris.com/acara/Libya-Pemberontakan-2011](https://www.Bahasa%20Inggris.com/acara/Libya-Pemberontakan-2011)

² Chulov, M. (18 Januari 2020). Turki, Rusia, dan dilema Libya. Al Jazeera <https://www.selain.C/op/2020/1/18/turki-Rusia-dan-Liberal-Libya-bersama>

³ Arini, Z. (2021). Intervensi Turki dan Mesir terhadap perang saudara di Libya. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2 (2), 202

⁴ Zikri, AAK (2021). Intervensi militer Turki terhadap wilayah kedaulatan Suriah tahun 2016-2019. *Universitas Riau*, 8 (1),

Turki, dengan luas 783.562 km² dan populasi 84 juta jiwa, berada di persimpangan Asia dan Eropa, menjadikannya negara strategis yang berbatasan dengan delapan negara serta memiliki akses ke Laut Hitam, Laut Aegea, dan Laut Mediterania. Letaknya yang strategis membuat Turki menjadi penghubung utama antara penghasil minyak dan gas (Azerbaijan, Iran, Irak, dan Rusia) dengan pasar Eropa melalui jaringan pipa seperti TANAP, BTC, dan TurkStream.⁵

Sebagai negara transit energi, Turki menghadapi tantangan geopolitik yang signifikan, khususnya di Laut Mediterania Timur. Penemuan cadangan gas alam dan minyak di kawasan ini memperkuat fokus Turki pada eksplorasi energi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Laut Mediterania Timur, dengan perkiraan cadangan gas mencapai 80 triliun kaki kubik, menjadi prioritas nasional bagi Turki untuk memastikan keamanan energi dan pertumbuhan ekonomi.⁶

Sengketa utama di Mediterania Timur melibatkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Turki, Yunani, dan Siprus. Yunani, berdasarkan UNCLOS, mengklaim bahwa pulau-pulau memiliki hak atas ZEE, termasuk Laut Aegea, dan berencana memperluas wilayah laut hingga 12 mil. Sebaliknya, Turki, yang belum meratifikasi UNCLOS, menolak klaim tersebut, menyatakan bahwa ZEE hanya dapat berasal dari daratan. Turki memperingatkan bahwa klaim Yunani dapat memicu konflik.⁷

Turki memperkuat klaim maritimnya melalui doktrin "Blue Homeland" (Mavi Vatan) dan penandatanganan MoU dengan Libya pada 2019, yang menetapkan batas maritim di Mediterania Timur. Kesepakatan ini memicu kritik internasional karena dianggap mengabaikan klaim Yunani dan Siprus. Konflik ini tidak hanya melibatkan Turki dan Yunani tetapi juga Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara regional seperti Mesir dan Israel, yang memiliki kepentingan energi di kawasan tersebut.⁸

Siprus terbagi sejak 1974 menjadi Yunani Siprus di selatan (Republik Siprus, anggota Uni Eropa) dan Turki Siprus di utara (Republik Siprus Utara/TRNC, hanya diakui oleh Turki). Konflik Siprus terkait erat dengan sengketa ZEE dan eksplorasi energi. Penemuan cadangan gas alam di sekitar Siprus memperburuk ketegangan antara Yunani Siprus dan Turki Siprus, dengan kedua pihak mengklaim hak atas sumber daya energi di kawasan tersebut.⁹

⁵ Geografi Muda. (2023, 13 Februari). *Geografi negara Turki*. Organisasi Geografi.[http : //www.geograf.com](http://www.geograf.com)

⁶ Hingil Larasati. (26 April 2021). "Turki dan Geopolitik Kontemporeranya". Kumparan. www.kumparan.com.

⁷ *ibid*

⁸ Daily Sabah, Turkey's Ambitious 'Blue Homeland' Policy Disturbs Greek Media," *Daily Sabah*,<https://www.da.com/politics/turk-amb-blue-homelan-pol-dist-gr-me/ne>.

⁹ Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. "Cyprus: Historical Overview," *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey*, <https://www.mfa.gov.tr/cyprus-historical-overview.en.mfa>.

Perselisihan ini melibatkan aktor internasional seperti Israel, Mesir, dan Prancis, yang memiliki kepentingan energi dan geopolitik di Mediterania Timur. Ketegangan meningkat dengan kegagalan Rencana Annan pada 2004 untuk menyelesaikan konflik, serta penemuan cadangan energi yang memperumit upaya mediasi.¹⁰

Turki mengadopsi pendekatan tegas untuk melindungi hak-hak maritimnya melalui doktrin "Blue Homeland." Kebijakan ini mencakup peningkatan kapabilitas militer, eksplorasi energi agresif, dan kerja sama strategis dengan negara-negara seperti Libya. Meskipun kebijakan ini memperkuat klaim Turki di Mediterania Timur, pendekatan ini juga memicu ketegangan dengan Yunani, Siprus, Uni Eropa, dan aktor global lainnya.¹¹

Sengketa ini menempatkan Turki sebagai aktor kunci dalam dinamika geopolitik Mediterania Timur, tetapi juga menghadapi negara tersebut pada isolasi diplomatik, kritik, dan potensi sanksi internasional. Dengan fokus pada eksplorasi energi, keamanan nasional, dan pengaruh regional, Turki terus memainkan peran utama dalam konflik dan upaya negosiasi di kawasan tersebut.

MOU DELIMITASI MARITIM TURKI DAN GNA LIBYA TERHADAP KEPENTINGAN TURKI DI LAUT MEDITERANIA TIMUR

MoU Delimitasi Maritim Turki-Libya 2019 merupakan perjanjian strategis yang menetapkan batas maritim kedua negara di Mediterania Timur. Secara teknis, perjanjian ini menggunakan standar internasional WGS'84 dan peta INT 308, serta terdaftar di PBB sesuai Pasal 102 Piagam PBB untuk mendapatkan legitimasi internasional.

Perjanjian ini memiliki implikasi luas meliputi:

1. Aspek ekonomi: membuka peluang eksplorasi hidrokarbon dan pengembangan infrastruktur bawah laut
2. Dimensi geopolitik: menantang klaim maritim Yunani dan Siprus sambil memperkuat posisi Turki
3. Mekanisme penyelesaian sengketa: mengutamakan jalur diplomatik dan kerja sama lintas batas

MoU ini menghadapi tantangan berupa oposisi regional dan pengakuan internasional, dengan implementasi yang bergantung pada perkembangan diplomatik dan pengelolaan kompleksitas hukum maritim. Namun,

¹⁰ Rivero, Miriam Zeballos. (22 Maret 2023) "Creciente Tensión entre Turquía y Grecia por Reservas de Gas en el Mediterráneo," *Universidad de Navarra - Global Affairs*, <https://en.unav.edu/web/global-affairs/creciente-tension-entre-turquia-y-grecia-por-reservas-de-gas-en-el-mediterraneo>.

¹¹ Isachenko, Daria dan Erol Kaymak. (6 September 2024). "Turkey's Strategic Autonomy in the Black Sea and the Eastern Mediterranean," SWP Berlin, <https://www.swp-berlin.org/publikation/turkeys-strategic-autonomy-in-the-black-sea-and-the-eastern-mediterranean>.

perjanjian ini tetap menjadi kerangka hukum bagi aktivitas maritim kedua negara dan memperkuat posisi strategis Turki di Mediterania Timur dalam aspek ekonomi, keamanan, dan geopolitik.

Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani antara Turki dan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya pada 2019 mengatur delimitasi maritim di Laut Mediterania, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum internasional yang mengikat. MoU ini lebih bersifat kesepakatan politik yang memperkuat klaim Turki terhadap zona ekonomi eksklusif (ZEE) di wilayah yang disengketakan dengan Yunani dan Siprus, meskipun bertentangan dengan prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang diakui oleh Yunani dan Siprus.¹²

Meski tidak meratifikasi UNCLOS, Turki menggunakan MoU ini sebagai dasar klaim maritim dengan mengabaikan ZEE Yunani dan Siprus di Mediterania Timur. Pendaftaran MoU ke PBB pada 2020 hanya bersifat administratif dan tidak mengubah status hukum internasionalnya. Meskipun tidak diakui universal, terutama oleh Yunani dan Uni Eropa, MoU ini memperkuat posisi negosiasi Turki dan memungkinkan eksplorasi energi di wilayah tersebut.

KEPENTINGAN NASIONAL TURKI MENANDATANGANI MOU DELIMITASI MARITIM DENGAN GNA LIBYA PADA TAHUN 2019

Laut Mediterania Timur, yang berbatasan dengan pesisir Yunani, Turki, Siprus, Suriah, Lebanon, Israel, dan Mesir, menghadapi kompleksitas dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) akibat banyaknya pulau dan entitas yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam, terutama gas dan minyak, yang memicu ketegangan terkait hak eksplorasi dan eksploitasi. Perselisihan antara Turki dan Yunani, terutama terkait klaim atas cadangan gas di Mediterania Timur, memperburuk ketidakpastian mengenai batas maritim.¹³

Yunani dan Siprus telah membentuk ZEE bersama untuk eksplorasi sumber daya, yang ditanggapi dengan penolakan dari Turki yang merasa dirugikan. Sebagai respons, Turki menandatangani MoU dengan Pemerintah Persatuan Nasional Libya (GNU) pada 2019 untuk mendirikan ZEE antara Turki dan Libya, yang ditentang oleh negara-negara lain seperti Mesir dan Yunani. MoU ini mempertegas persaingan kekuasaan di kawasan dan

¹² France 24. (10 Maret 2022). "Turkey and Libya Sign Maritime Hydrocarbons Deal," *France 24*, <https://www.france24.com/en/live-news/20221003-turkey-and-libya-sign-maritime-hydrocarbons-deal-1>.

¹³ Başeren, Sertaç Hami. (19 maret 2022). "Root Causes of the Eastern Mediterranean Dispute: Approaches of the Main Actors," *Insight Turkey*, <https://www.insightturkey.com/commentaries/root-causes-of-the-eastern-mediterranean-dispute-approaches-of-the-main-actors>.

dipandang sebagai bagian dari kebijakan Turki untuk memperkuat kepentingan strategisnya di wilayah tersebut.

Menurut teori realisme Morgenthau, negara bertindak sesuai dengan kepentingan nasional yang berfokus pada kekuatan, keamanan, dan kekayaan. Turki, dalam konteks ini, menginginkan akses ke sumber daya energi, penguasaan jalur perdagangan, dan pengaruh geopolitik. Dukungan terhadap GNA Libya dianggap sebagai langkah strategis untuk melindungi kepentingan tersebut.

Menurut Donald E. Nuechterlein, ada empat kepentingan nasional Turki dalam kebijakan ini:

Kepentingan Ekonomi

Penurunan PDB Turki pada 2019 mencerminkan tantangan ekonomi, seperti inflasi tinggi dan ketidakpastian geopolitik, yang mendorong Turki untuk mencari solusi strategis. Salah satunya adalah penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan GNA Libya pada 2019. MoU ini memberi Turki akses ke wilayah maritim kaya energi di Mediterania Timur, memungkinkan eksplorasi sumber daya energi baru untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, khususnya minyak dan gas alam.¹⁴

Impor minyak mentah Turki meningkat dari 410.000 ke 450.000 barrel/hari (2017-2019), terutama dari Rusia, Irak, dan Iran, sementara impor gas alam menurun dari 55,249 ke 45,211 miliar meter kubik akibat diversifikasi energi. MoU dengan Libya merupakan langkah strategis Turki untuk mendapatkan akses energi domestik, dengan TPAO melakukan eksplorasi minyak di wilayah yang disepakati guna memperkuat posisi sebagai pusat transit energi dan mengurangi ketergantungan impor.

Kepentingan Pertahanan

Turki memperkuat posisinya di Mediterania Timur melalui serangkaian kebijakan dan langkah strategis, termasuk penandatanganan MoU dengan Libya. MoU ini memberikan Turki legitimasi untuk memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan merupakan titik persaingan geopolitik antara negara-negara seperti Yunani, Siprus, dan Mesir.

Geopolitik dan Keamanan Maritim: Turki memperkuat klaim maritimnya melalui MoU dengan Libya, memungkinkan negara ini untuk mengamankan akses ke jalur pelayaran penting dan memperkuat kontrol atas sumber daya energi seperti gas alam. Kehadiran militer Turki di Libya juga memperkuat posisinya di Mediterania Timur, mengimbangi pengaruh negara-negara rival seperti Mesir dan Uni Emirat Arab. Dengan memperluas

¹⁴ Ali Rıza Güngen, (2019). "Turkey's Economy Amid the COVID-19 Pandemic: Measures and Their Impact", OpenEdition Books, <https://books.openedition.org/ifeagd/3827?lang=en>.

klaim maritim dan meningkatkan kehadiran militernya, Turki memperkuat posisinya sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut.¹⁵

Kemandirian Industri Pertahanan: Industri pertahanan Turki berkembang pesat, berfokus pada kemandirian teknologi dan mengurangi ketergantungan pada impor alutsista. Perusahaan-perusahaan pertahanan utama seperti TAI/TUSAŞ, ASELSAN, dan Baykar Technology memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem pertahanan canggih, termasuk pesawat tempur, drone, dan kapal perang. Pengembangan ini mendukung ambisi Turki untuk mempertahankan kedaulatannya di Mediterania Timur dan memperkuat posisinya dalam persaingan global.

Kebijakan Geopolitik dan Sengketa Laut Mediterania Timur: Turki mengklaim hak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Mediterania Timur, dengan alasan bahwa pulau-pulau kecil di kawasan tersebut tidak memiliki hak yang sama untuk menentukan batas ZEE secara independen. Hal ini bertentangan dengan klaim Yunani dan Siprus yang merujuk pada hukum internasional. Dengan perjanjian maritim dengan Libya pada 2019, Turki memperluas zona yurisdiksinya dan mengamankan kepentingan energi dan maritimnya. Langkah ini menegaskan posisi Turki dalam sengketa tersebut, meskipun menimbulkan ketegangan dengan negara tetangga.

Secara keseluruhan, kebijakan pertahanan dan geopolitik Turki di Mediterania Timur berfokus pada pengamanan sumber daya alam, perluasan pengaruh militer, dan peningkatan kemandirian industri pertahanan untuk mendukung tujuan strategisnya.

Kepentingan Ideologi

Doktrin "Blue Homeland" yang diperkenalkan oleh Laksamana Cem Gürdeniz pada 2006, menegaskan klaim maritim Turki di Laut Aegea dan Laut Mediterania Timur, terutama atas wilayah yang kaya akan sumber daya energi, seperti gas alam. Doktrin ini mencakup sekitar 462.000 km² dan menjadi elemen penting dalam kebijakan luar negeri Turki di bawah Presiden Erdoğan. Melalui "Blue Homeland", Turki memperkuat hak maritimnya dengan latihan angkatan laut dan strategi militer, meningkatkan ketegangan dengan Yunani dan Siprus yang menentang klaim tersebut. Pada 2019, Turki dan Libya menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang mengatur delimitasi batas maritim, memperkuat klaim Turki terhadap sumber daya energi di Mediterania Timur dan memperluas pengaruh geopolitiknya, meskipun memperburuk ketegangan dengan negara-negara tetangga dan aktor internasional.¹⁶

¹⁵ France 24. (3 oktober 2022). "Turkey and Libya Sign Maritime Hydrocarbons Deal," *France 24*, <https://www.france24.com/en/live-news/20221003-turkey-and-libya-sign-maritime-hydrocarbons-deal-1>.

¹⁶Daily Saibah. (21 April 2022). "Turkey's Ambitious 'Blue Homeland' Policy Disturbs Greek Media," *Daily Sabah*, diakses 29 Januari 2025,

Neo-Ottomanisme adalah kebijakan Turki untuk menghidupkan kembali pengaruh geopolitik Kekaisaran Ottoman, yang melibatkan ekspansi pengaruh di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Balkan. Di bawah Erdoğan, Turki menggabungkan kekuatan militer, diplomasi, dan ekonomi untuk memperkuat posisinya. Kebijakan ini terlihat dalam dukungan terhadap Pemerintah Kesepakatan Nasional di Libya dan pengaruhnya di Mediterania Timur, meskipun sering dianggap sebagai ekspansionisme yang mengganggu stabilitas kawasan.

Kepentingan Tanan Dunia

Kepentingan Turki di Laut Mediterania Timur didorong oleh tujuan untuk mengamankan pasokan energi, meningkatkan pengaruh ekonomi, dan melindungi kedaulatan negara. Salah satu langkah utama yang diambil Turki adalah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya pada 2019, yang memungkinkan Turki untuk mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah tersebut. Perjanjian ini meningkatkan ketegangan dengan negara-negara seperti Yunani dan Siprus, yang menilai kesepakatan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak-hak mereka di kawasan.

MoU ini memberi Turki kontrol atas batas maritim dan memperkuat klaimnya terhadap sumber daya energi di Mediterania Timur. Selain itu, kesepakatan ini memfasilitasi kerja sama energi antara Turki dan Libya, yang memperkuat posisi Turki sebagai pusat energi di kawasan tersebut. Namun, perjanjian ini juga meningkatkan ketegangan diplomatik dengan negara-negara tetangga, menciptakan dampak negatif pada eksplorasi hidrokarbon, dan merumitkan hubungan internasional Turki.

Beberapa implikasi penting dari MoU ini meliputi:

1. Uji Coba Hukum Internasional: MoU ini menguji penerapan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) dan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya.
2. Persaingan Geopolitik: Meningkatkan persaingan antara kekuatan besar seperti Rusia, AS, dan Uni Eropa, serta memperburuk hubungan antara Turki dan Yunani.
3. Keamanan Regional: MoU ini berpotensi meningkatkan militerisasi di kawasan dan meningkatkan risiko konflik bersenjata akibat sengketa wilayah maritim.
4. Kerjasama Regional yang Terhambat: Menghambat kerjasama ekonomi, energi, dan keamanan di kawasan, serta membentuk blok-blok politik yang saling berseberangan.
5. Hubungan Bilateral yang Memburuk: Menyebabkan ketegangan dalam hubungan bilateral antara Turki dengan Yunani, Mesir, dan Siprus.

6. Pengaruh Global: Ketidakstabilan di Mediterania Timur berpotensi mempengaruhi stabilitas global, terutama terkait isu energi dan migrasi, serta menantang peran organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa dalam menjaga perdamaian.

MoU ini mengguncang tatanan internasional dan mempengaruhi dinamika politik serta keamanan di kawasan, dengan potensi menciptakan konflik bersenjata. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi damai dalam sengketa ini.

KESIMPULAN

Turki memiliki kepentingan nasional yang kuat di Laut Mediterania Timur, terutama terkait eksplorasi sumber daya energi dan pengaruh geopolitik. Ketidakstabilan politik di Libya menciptakan peluang bagi Turki untuk terlibat dalam eksplorasi energi, karena Libya kaya akan cadangan minyak dan gas. Pada 2019, Turki menandatangani perjanjian maritim dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya, yang memperluas klaim wilayah Turki di Laut Mediterania Timur dan mengamankan hak eksplorasi energi, sembari membatasi pengaruh negara lain seperti Yunani dan Siprus.

Turki mengimplementasikan kebijakan yang mencakup penelitian seismik dan pengeboran di kawasan tersebut dengan kapal seperti Oruc Reis, Fatih, dan Yavuz, guna mengeksploitasi sumber daya energi. Turki juga memperkuat posisi militernya di kawasan ini melalui latihan militer dan pengawasan kapal pengeboran. Konsep *Blue Homeland* dan Neo-Ottomanisme mendasari kebijakan ini, menekankan pentingnya kontrol atas wilayah maritim untuk keamanan, ekonomi, dan identitas nasional.

Melalui MoU dengan Libya, Turki mendapatkan dasar hukum untuk aktivitas eksplorasi dan memperkuat klaimnya, meningkatkan legitimasi internasional. Ini menunjukkan upaya Turki untuk menjadi kekuatan maritim dominan, mempengaruhi tatanan geopolitik Mediterania, dan mengimbangi pengaruh negara-negara lain, terutama Yunani, yang juga memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Strategi Turki menggabungkan eksplorasi energi, militer, ideologi nasional, dan perjanjian internasional untuk memperkuat posisinya di Laut Mediterania Timur.

REFERENSI

Ali Rıza Güngen, (2019). "Turkey's Economy Amid the COVID-19 Pandemic: Measures and Their Impact", OpenEdition Books, <https://books.openedition.org/ifeagd/3827?lang=en>.

Arini, Z. (2021). Intervensi Turki dan Mesir terhadap perang saudara di Libya. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2 (2), 202

Başeren, Sertaç Hami. (19 maret 2022). "Root Causes of the Eastern Mediterranean Dispute: Approaches of the Main Actors," Insight Turkey, <https://www.insightturkey.com/commentaries/root-causes-of-the-eastern-mediterranean-dispute-approaches-of-the-main-actors>.

Britannica. (nd). Pemberontakan Libya tahun 2011. <https://www.BahasaInggris.com/acara/Libya-Pemberontakan-2011>

Chulov, M. (18 Januari 2020). Turki, Rusia, dan dilema Libya. Al Jazeera <https://www.selain.C/op/2020/1/18/turki-Rusia-dan-Libya-bersama>

Daily Sabah, Turkey's Ambitious 'Blue Homeland' Policy Disturbs Greek Media," Daily Sabah, <https://www.da.com/politics/turk-amb-blue-homeland-pol-dist-gr-me/ne>.

Daily Saibah. (21 April 2022). "Turkey's Ambitious 'Blue Homeland' Policy Disturbs Greek Media," Daily Sabah, diakses 29 Januari 2025, <https://www.dailysabah.com/politics/turkiyes-ambitious-blue-homeland-policy-disturbs-greek-media/news>.

France 24. (10 Maret 2022). "Turkey and Libya Sign Maritime Hydrocarbons Deal," France 24, <https://www.france24.com/en/live-news/20221003-turkey-and-libya-sign-maritime-hydrocarbons-deal-1>.

France 24. (3 oktober 2022). "Turkey and Libya Sign Maritime Hydrocarbons Deal," France 24, <https://www.france24.com/en/live-news/20221003-turkey-and-libya-sign-maritime-hydrocarbons-deal-1>.

Geografi Muda. (2023, 13 Februari). Geografi negara Turki. Organisasi Geografi. <http://www.geograf.com>

Hingil Larasati. (26 April 2021). "Turki dan Geopolitik Kontemporeranya". Kumparan. www.kumparan.com.

Isachenko, Daria dan Erol Kaymak. (6 September 2024). "Turkey's Strategic Autonomy in the Black Sea and the Eastern Mediterranean," SWP Berlin, <https://www.swp-berlin.org/publikation/turkeys-strategic-autonomy-in-the-black-sea-and-the-eastern-mediterranean>.

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. "Cyprus: Historical Overview," Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, https://www.mfa.gov.tr/cyprus-_historical-overview_.en.mfa.

Rivero, Miriam Zeballos. (22 Maret 2023) "Creciente Tensión entre Turquía y Grecia por Reservas de Gas en el Mediterráneo," Universidad de Navarra - Global Affairs, <https://en.unav.edu/web/global-affairs/creciente-tension-entre-turquia-y-grecia-por-reservas-de-gas-en-el-mediterraneo>.

Zikri, AAK (2021). Intervensi militer Turki terhadap wilayah kedaulatan Suriah tahun 2016–2019. Universitas Riau, 8 (1),